

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR/DPRD.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Yang Telah diganti Dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang kemungkinan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai atau kualitas (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah sektor publik harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi pemerintah (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010) adalah 1.) relevan, 2.) andal, 3.) dapat dibandingkan, dan 4.) dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksud agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada

gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang system informasi keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan system informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Menurut Romney dalam Rahmawati dkk (2010) bahwa pemanfaatan teknologi informasi di dalam organisasi bukan merupakan strategi dasar dari organisasi tersebut, implementasi teknologi informasi digunakan untuk membantu dalam pencapaian strategi organisasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, akses terhadap proses bisnis perusahaan dapat dilakukan dengan cepat sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat dan pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi informasi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurang.

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik, maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2006 dalam Fikri, 2011).

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 51

Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut keputusan presiden No. 74 tahun 2001(Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan keuangan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dihasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Dalam hal ini, informasi yang dibutuhkan oleh institusi publik atas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan dan informasi perencanaan dan penganggaran (Novia et.al, 2015)

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Irfan Ikhwanul Haza (2008) tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

(studi empiris pada SKPD Pemerintah kota padang). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah kota padang dimana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kota padang dimana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Kombong (2017) Tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Laporan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Penelitian Yang Dilakukan Muhamad Rifandi (2018) Tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Yogyakarta). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah

daerah dan pengawasan keuangan daerah juga berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas maka peneliti tertarik dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ikhwanul Haza (2008) tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi empiris pada SKPD Pemerintah kota padang).

Berdasarkan latar belakang diatas, dan perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai :
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada OPD Kabupaten Malaka).

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Pengawasan keuangan daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada OPD Kabupaten Malaka).**

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah Pada OPD Kabupaten Malaka?
2. Apakah Pengawasan keuangan daerah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah Pada OPD Kabupaten Malaka?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Malaka.
- b. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengawasan keuangan daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Malaka.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas, sehingga diharapkan pemerintah daerah atau OPD kabupaten malaka dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah supaya terpacainya laporan keuangan yang berkualitas.